



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370  
BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.848-DPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KESEHATAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan masyarakat dan keluarga yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri dan kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan, perlu diupayakan pembinaan melalui lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan di Lingkungan Kota Bandung yang dimotori oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait kegiatan lomba sebagaimana dimaksud huruf a sehingga dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009](#) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  5. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1388 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja dalam melaksanakan pembinaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan penyusunan dokumen kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
  - c. mempersiapkan ...

- c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan pembuatan dokumen kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
- d. melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada lokasi kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
- e. melakukan kerjasama dengan Instansi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
- f. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah yang terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung; dan
- h. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/848-DPPKB/2019

TANGGAL : 18 Oktober 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KESEHATAN

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; dan  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;  
2. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; dan  
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Wakil Ketua IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

Wakil ...

- Wakil Ketua I : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Bendahara : Bendahara pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Koordinator : Ketua Pokja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Anggota Pokja I pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Anggota Pokja II pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
6. Anggota Pokja III pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang ...

Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
 7. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
 8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
 9. Kepala Bidang Rehabilitasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersamaan;  
 10. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
 11. Kepala ...

11. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pemberdayaan Penyuluhan dan Kerjasama pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
16. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
19. Kepala ...

19. Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Ketahanan Remaja pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
26. Kepala ...

26. Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
27. Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
28. Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
29. Anggota Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
30. Anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
31. Anggota Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; dan
32. Anggota Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

Bidang Kesehatan

Koordinator

: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan,

3. Kepala ...

Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;

4. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
5. Anggota Pokja IV Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/848-DPPKB/2019

TANGGAL : 18 Oktober 2019

---

URAIAN TUGAS TIM KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KESEHATAN

Pembina:

Memberikan pembinaan kepada Tim Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan dalam program pembinaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Pengarah:

Memberikan arahan, pandangan umum, masukan dan saran berkaitan dengan program Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Penanggungjawab:

Bertanggungjawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam program Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Ketua:

Memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Wakil Ketua:

Membantu memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Sekretaris ...

Sekretaris:

- a. menyiapkan bahan-bahan, menyusun jadwal kegiatan memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan; dan
- b. menyiapkan data dan menyusun bahan laporan, rencana kerja, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Bendahara:

Membuat rencana penerimaan anggaran, menyimpan dan membayarkan serta menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran program kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan.

Koordinator:

Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

Anggota Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK):

- a. melaksanakan pembinaan kepada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 terkait pencatatan dalam kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan; dan
- b. melaksanakan pembinaan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan, posyandu, dan Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah (Pokjanel DBD).

Anggota Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK):

- a. melakukan pembinaan kepada petugas lapangan Keluarga Berencana dan institusi masyarakat;
- b. membentuk, membina dan mengembangkan Bina Keluarga Balita (BKB);
- c. membentuk, membina dan mengembangkan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR);

d. membentuk ...

- d. membentuk, membina dan mengembangkan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- e. membentuk, membina dan mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. memfasilitasi terselenggaranya kursus atau peningkatan ketrampilan bagi warga di Kampung Keluarga Berencana;
- g. memfasilitasi terselenggaranya kejar paket A, paket B dan Paket C;
- h. memfasilitasi dan membuat pojok kependudukan/perpustakaan mini di Kampung Keluarga Berencana;
- i. memfasilitasi pembuatan rumah data;
- j. memotivasi pasangan usia subur untuk berKeluarga Berencana;
- k. membina kelangsungan Keluarga Berencana;
- l. menyelenggarakan pembentukan, pembinaan dan pengembangan Posyandu Multi Fungsi;
- m. mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja;
- n. membentuk pusat informasi dan konseling remaja dan kampanye pendewasaan usia perkawinan;
- o. melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana;
- p. penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu;
- q. mengoordinasikan layanan dan pembinaan peserta Keluarga Berencana dengan dokter dan bidan swasta;
- r. memfasilitasi dan mempromosikan potensi yang dimiliki oleh warga Kampung Keluarga Berencana;
- s. memberikan pelatihan kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berupa pelatihan produk unggulan dan kemasan;
- t. memfasilitasi produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk mempunyai izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal; dan
- u. membantu pemasaran produk unggulan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Anggota ...

Anggota Bidang Kesehatan:

- a. melakukan pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi di posyandu;
- b. melakukan pembinaan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga; dan
- c. melakukan pembinaan mengenai Lingkungan Bersih Sehat (LBS).

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027